

P R A K A R S A *Policy Brief*

Agustus 2023

Indeks Kemiskinan Multidimensi: Mengupas Jejak Kemiskinan Masyarakat



Dimensi Kemiskinan Multidimensi Global dan Nasional

Pembatasan definisi kemiskinan pada satu indikator dapat menimbulkan bias pada indikator-indikator lain yang berkontribusi pada kemiskinan. Situasi pandemi Covid-19 menjadi pembelajaran yang penting karena penduduk rentan jatuh miskin akibat terbatasnya akses pendidikan, kesehatan, dan komunikasi. Namun, dimensi-dimensi tersebut tidak masuk sebagai indikator pengukuran kemiskinan di Indonesia. Sebelum pandemi terjadi, kemiskinan di Indonesia sudah menyentuh satu digit, atau 9,66% dari total penduduk Indonesia pada tahun 2018 (BPS, 2019). Pengukuran kemiskinan dihitung berdasarkan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, yang disebut sebagai indikator kemiskinan moneter.

Saat pandemi terjadi, masyarakat memiliki ruang gerak terbatas di dalam rumah, akses internet yang kurang memadai, dan keterbatasan perlindungan sosial. Di saat bersamaan jumlah masyarakat miskin di tahun 2020–2021 meningkat. Hal ini membuktikan bahwa kemiskinan merupakan fenomena multidimensi dan tidak dapat diterjemahkan secara tunggal. Pengukuran dengan menggunakan pendekatan multidimensi mutlak dibutuhkan agar strategi penurunan angka kemiskinan dapat dilakukan secara optimal (Bourguignon & Chakravarty, 2019).

Kemiskinan multidimensi mencakup berbagai keterbatasan yang dialami oleh orang miskin dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Pada tahun 2010, Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) mengembangkan Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM). Pengukuran kemiskinan multidimensi dapat memasukkan serangkaian indikator yang menangkap realitas kompleksitas fenomena untuk memberikan masukan terhadap kebijakan yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan kekurangan di suatu negara. IKM tidak dimaksudkan untuk menggantikan kemiskinan moneter, melainkan memberikan pandangan yang lebih luas dan terukur dalam mengurai karakteristik kemiskinan. IKM juga tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kemiskinan moneter dan kesenjangan dalam indeks gini, karena indikator pengukuran kemiskinan moneter dan indeks gini menggunakan dasar pendapatan atau pengeluaran,

sedangkan IKM berbasis pada deprivasi rumah tangga pada beberapa dimensi dan indikator.

IKM telah diadopsi oleh beberapa negara di dunia dan menghasilkan perubahan kebijakan penanganan kemiskinan. Beberapa negara yang telah mengadopsi IKM adalah Meksiko, Thailand, Vietnam, Kolombia, Tiongkok, Bhutan, dan India. Di Thailand, pengukuran IKM dilakukan setiap dua tahun sekali dan menjadi bukti bagi pemangku kebijakan untuk mereformasi sistem jaminan sosial dengan tujuan memberantas kemiskinan pada kelompok lanjut usia. Belajar dari Thailand, IKM berfungsi untuk mengidentifikasi di mana dan dalam bentuk apa kemiskinan terjadi. Sehingga, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih strategis, efektif, dan tidak menyamaratakan intervensi kebijakan pada kondisi kemiskinan yang berbeda-beda di setiap wilayah.

OPHI menggunakan tiga dimensi pengukuran dalam menyusun IKM global yakni kesehatan, pendidikan dan standar hidup. Dimensi ini kemudian dikembangkan oleh PRAKARSA (2022) untuk penghitungan indeks kemiskinan multidimensi PRAKARSA sejak 2012 hingga 2021:

2012
2014

Dimensi pada penghitungan IKM:

- Kesehatan
- Pendidikan
- Standar hidup

2015
2018

Dimensi pada penghitungan IKM:

- Kesehatan
- Pendidikan
- Standar hidup

2019
2021

Dimensi pada penghitungan IKM:

- Kesehatan
- Pendidikan
- Perumahan
- Layanan dasar
- Perlindungan sosial dan partisipasi

Penentuan dimensi dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan pertimbangan IKM global, ketersediaan data, dan relevansi sehingga dimensi dan indikator dapat berbeda-beda. Penyusunan IKM juga mempertimbangkan masukan dari ahli dan pemangku kepentingan kunci untuk menyesuaikan konteks kemiskinan yang ada di Indonesia.

Penentuan indikator IKM ini menggunakan dua tingkat penapisan berdasarkan dimensi dan bobot. Pada periode 2019 - 2021, penapisan pertama

Pesan Kunci:

- Jumlah penduduk miskin secara multidimensi dalam sepuluh tahun terakhir mengalami penurunan lebih dari 80 juta jiwa dari 120,1 juta jiwa pada 2012 menjadi 38,95 juta jiwa pada 2021.
- Indikator material rumah layak, air minum layak, dan morbiditas merupakan tiga indikator kemiskinan multidimensi dengan tingkat deprivasi paling tinggi pada tahun 2021.
- Penurunan deprivasi terbesar pada dimensi kesehatan dan indikator internet tahun 2021 salah satunya disebabkan oleh peningkatan penganggaran kesehatan dan pemerataan infrastruktur internet pada masa pandemi.

menggunakan lima dimensi sebagai indikator IKM dan diberi pembobotan masing-masing sama rata 0,2 atau 20%. Kemudian, lima dimensi tersebut diberikan penapisan kedua dalam penentuan bobot indikator. Bobot indikator dibagi secara proporsional sesuai dengan jumlah indikator dalam satu dimensi. Selanjutnya, nilai IKM didapatkan dari hasil perkalian antara angka kemiskinan multidimensi dengan intensitas kemiskinan multidimensi.

Profil Kemiskinan Multidimensi di Indonesia 2012 – 2021

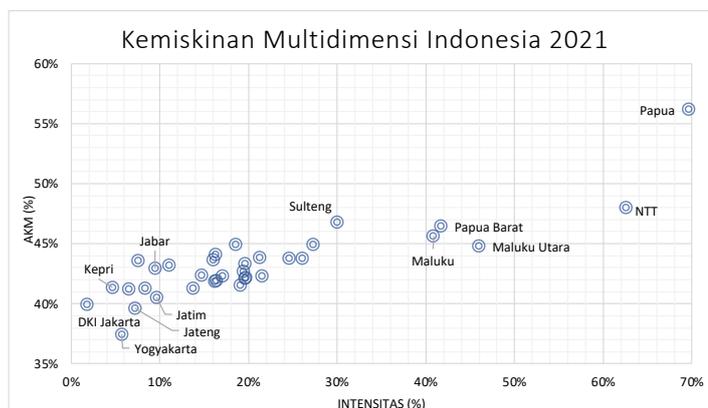
Sejak tahun 2012 sampai 2021, jumlah penduduk miskin secara multidimensi mengalami penurunan secara terus menerus. Penduduk miskin secara multidimensi selama sepuluh tahun terakhir menurun lebih dari 80 juta jiwa, dimana pada tahun 2012 sejumlah 120,1 juta jiwa menjadi 38,95 juta jiwa pada tahun 2021. Penurunan jumlah penduduk miskin multidimensi sebanyak itu menyebabkan angka kemiskinan multidimensi turun dari 48,98% (2012) menjadi 14,34% (2021).

Penurunan jumlah penduduk miskin paling besar terjadi pada tahun 2019 – 2020 sejumlah 14 juta jiwa. Secara umum, penurunan angka kemiskinan multidimensi pada periode ini 2019 – 2020 disebabkan karena indikator pemanfaatan akses internet meningkat signifikan terutama selama masa pandemi Covid-19 yang dimulai diawal tahun 2020.

AKM di desa turun hampir 2 kali lebih banyak daripada wilayah perkotaan selama 2012 – 2021. AKM desa menurun dari 68,15% pada tahun 2012 menjadi 23,88% pada tahun 2021. Sementara itu, AKM kota menurun dari 29,83% pada 2012 menjadi 7,1% pada 2021. Di tahun 2021, angka kemiskinan multidimensi di wilayah perkotaan sebesar 7,1% sedangkan di wilayah perdesaan sebesar 23,9%.

Sejalan dengan penurunan jumlah penduduk multidimensi dan AKM, intensitas kemiskinan multidimensi secara nasional juga mengalami penurunan. Intensitas kemiskinan multidimensi secara nasional turun dari 50,87% pada 2012 menjadi 43,99% pada 2021. Intensitas kemiskinan multidimensi sebesar 43,99% pada 2021 mengindikasikan bahwa setiap penduduk miskin, rata-rata terdeprivasi sebesar 43,99% dari nilai seluruh indikator. Penurunan intensitas kemiskinan multidimensi selama 2012–2021 disebabkan oleh penurunan intensitas kemiskinan multidimensi di perdesaan yang lebih besar setiap tahunnya sekitar 0,75 poin setiap tahun dibandingkan dengan perkotaan sebesar 0,55 poin.

IKM Indonesia pada 2021 berada di angka 0,03 jauh lebih baik dari IKM tahun 2012 sebesar 0,14. Penurunan IKM terbesar terjadi antara tahun 2014–2015 yaitu turun sebesar 0,04 poin dari sebelumnya sebesar 0,21 poin menjadi 0,17poin. Penurunan ini sebagian besar disumbang oleh penurunan jumlah penduduk miskin multidimensi di desa sekitar lebih dari 10 juta jiwa.



Sumber: PRAKARSA, 2023

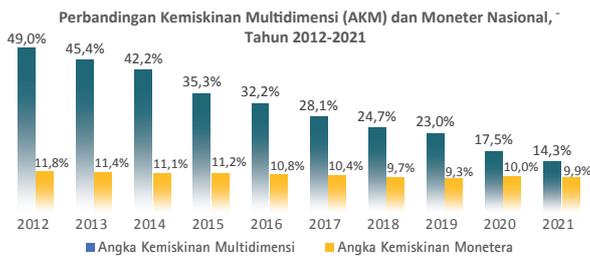
Provinsi Papua merupakan provinsi dengan IKM tertinggi tahun 2021 di Indonesia yakni sebesar 0,39 poin. Sedangkan provinsi dengan IKM terendah ditempati oleh Provinsi DKI Jakarta sebesar 0,01 poin. Provinsi Papua mencatat tingkat AKM (69,7%) dan intensitas (56,2%) tertinggi se-nasional. Sedangkan provinsi dengan tingkat Angka Kemiskinan Multidimensi (AKM) terendah ialah DKI Jakarta (1,8%) dan provinsi dengan intensitas kemiskinan multidimensi terendah adalah DI Yogyakarta (37,5%). Semakin rendah tingkat AKM maka semakin rendah jumlah penduduk miskin dan semakin rendah tingkat intensitas ini maka tingkat keparahan kemiskinan yang ditanggung oleh individu juga semakin rendah.

Dalam periode 2019 – 2021 indikator material rumah layak, air minum layak, dan tingkat morbiditas menjadi indikator paling dominan membentuk kemiskinan multidimensi. Dari hampir 39 juta individu dalam rumah tangga yang miskin multidimensi pada 2021, sebanyak 86,4% atau 33,7 juta diantaranya tinggal dalam rumah dengan material tidak layak huni. Pada indikator akses air minum layak, sejumlah

57% atau 22,2 juta penduduk miskin tinggal dalam rumah tangga yang tidak punya sumber air minum layak. Sedangkan dalam aspek morbiditas, 52,5% atau 20,4 juta orang memiliki anggota rumah tangga yang mengalami masalah kesehatan.

Perbandingan Kemiskinan Multidimensi dan Moneter

Perbandingan hasil penghitungan AKM dengan angka kemiskinan moneter bermanfaat untuk melihat karakteristik kemiskinan di Indonesia. Grafik dibawah menunjukkan kondisi AKM dan angka kemiskinan moneter di Indonesia selama 2012 – 2021. Pada grafik tersebut, persentase kemiskinan multidimensi konsisten di atas kemiskinan moneter dengan tren yang terus menurun secara signifikan. Sedangkan, jika dicermati angka kemiskinan moneter yang berbasis pada rilis BPS tahunan setiap bulan Maret dan September menunjukkan tren yang cenderung stabil di antara 9-12% tiap tahun.



Sumber: PRAKARSA, 2023

Pada 2021, perbedaan angka kemiskinan multidimensi dengan kemiskinan moneter semakin kecil, dimana masing-masing sebesar 14,34% dan 9,93% dari total penduduk Indonesia. Selama 10 tahun terakhir, AKM turun hingga hampir 35%, lebih banyak dibandingkan kemiskinan moneter yang hanya turun sekitar 2%. Penurunan angka kemiskinan multidimensi dipengaruhi oleh tiga indikator yang menurun secara signifikan yakni: internet, morbiditas, dan nutrisi balita.

Perkembangan Kebijakan dan Program Penanganan Kemiskinan di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah berupaya menurunkan angka kemiskinan sejak beberapa dekade terakhir. Upaya ini dilakukan melalui beberapa program di antaranya dengan pemberian bantuan sosial dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT), subsidi bahan bakar minyak (BBM), bantuan biaya pendidikan seperti program Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, serta Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Ketenagakerjaan. Namun untuk kategori kepesertaan penerima bantuan iuran (PBI) dari pemerintah hanya berlaku untuk program jaminan kesehatan nasional (JKN) saja, sedangkan untuk jaminan ketenagakerjaan belum ada kategori peserta PBI.

PRAKARSA (2023) mencatat terdapat indikator yang mengalami tren penurunan dalam tiga tahun terakhir yakni internet, morbiditas, dan nutrisi balita (2019 – 2021). Pada indikator internet, data BPS menunjukkan indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (IP-TIK) naik dari 5,07 tahun 2018 menjadi 5,32 pada tahun 2019 (Dirjen Anggaran Kemkeu, 2020). Tingkat penurunan ini didukung oleh kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 25 tahun 2015 tentang pelaksanaan kewajiban pelayanan universal telekomunikasi dan informatika mengenai pemerataan akses internet. Pandemi Covid-19 mendorong pemerintah mengupayakan akselerasi pemerataan akses internet di seluruh wilayah Indonesia. Program ini diharapkan menjadi pijakan awal perbaikan pemerataan pembangunan di sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sektor lainnya.

Selain itu, pandemi juga berpengaruh pada penurunan tingkat deprivasi dimensi kesehatan. Pandemi mendorong masyarakat lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan, melaksanakan perilaku hidup bersih, dan sehat, terlihat dari angka morbiditas yang menurun dari 56,6% ke 52,5% antara tahun 2019 dan 2021. Realisasi anggaran untuk kesehatan juga sempat mengalami peningkatan antara tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2019 realisasi anggaran kesehatan mencapai 113,6 triliun rupiah (4,9%) menjadi 172,2 triliun rupiah (6,6%) di tahun 2020 (Dirjen Anggaran Kemenkeu RI, 2022). Meskipun pada tahun 2021, anggaran kesehatan Indonesia mengalami penurunan sebesar 2.531

milliar rupiah (6,2%). Secara umum, tren kenaikan anggaran kesehatan ini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

Kemudian, pemerintah Indonesia sudah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 42 tahun 2013 tentang gerakan nasional percepatan perbaikan gizi. Peraturan ini mewajibkan kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota melaporkan pelaksanaan kegiatan percepatan perbaikan gizi minimal satu tahun sekali pada Ketua Gugus Tugas dan Menteri Dalam Negeri. Lalu, diperbarui dengan Perpres nomor 83 tahun 2017 tentang kebijakan strategis pangan dan gizi untuk jangka waktu 2017-2019. Peraturan ini selanjutnya disempurnakan dalam Perpres nomor 27 tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting*. Berbagai kebijakan tersebut berupaya mendorong perbaikan nutrisi balita dan pemenuhan gizi untuk ibu hamil dapat dioptimalkan sampai ke tingkat provinsi/kabupaten/kota.

Sedangkan pada beberapa dimensi seperti dimensi pendidikan, kesehatan dan standar hidup masih belum mengalami perubahan yang berakibat pada stagnannya angka kemiskinan moneter di Indonesia. Hal ini terjadi karena beberapa indikator kemiskinan non-moneter berpengaruh terhadap tingkat pendapatan rumah tangga. Sebagai contoh dimensi pendidikan mengalami kenaikan tingkat deprivasi dari 49,4% tahun 2020 menjadi 51,4% tahun 2021. Deprivasi pada dimensi ini berdampak pada kenaikan angka pengangguran terbuka saat pandemi Covid-19 terjadi.

Indikator rumah layak dan air minum layak merupakan indikator yang mengalami penurunan paling rendah sejak tahun 2012 sampai 2021. Bahkan pada indikator rumah layak justru mengalami kenaikan dari 81,7% di tahun 2019 menjadi 86,4% di tahun 2021.

Jika dilihat dari kebijakan sebetulnya Pemerintah Indonesia sudah menetapkan beberapa kebijakan yang mendukung rumah layak bagi masyarakat seperti UU nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman yang mengatur kemudahan memperoleh bantuan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kemudian pada tahun 2014 pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2014 tentang petunjuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dalam rangka pengadaan perumahan melalui kredit/pembiayaan pemilihan rumah sejahtera. Pada tahun 2020 terdapat program bantuan pembangunan rumah swadaya yang diatur dalam Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Peraturan Menteri PUPR nomor 1 tahun 2021 tentang kriteria masyarakat berpenghasilan rendah dan persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah dan Peraturan Menteri PUPR nomor 7 tahun 2022 tentang pelaksanaan bantuan pembangunan perumahan dan penyediaan rumah khusus.

Bantuan Subsidi Pemerintah untuk Perumahan (dalam triliun rupiah)



Sumber: Kementerian PUPR Ditjen Pembiayaan Infrastruktur, 2023

Penanggungjawab Pelaksana:

Ah Maftuchan

The PRAKARSA Executive Director

Ditulis oleh :

- Aqilatul Layyinah
- Darmawan Prasetya
- Rizky Deco Praha
- Eka Afrina Djamhari
- Victoria Fangiidae

Didesain oleh:

Bambang Nurjaman

PRAKARSA Policy Brief adalah analisis dan rekomendasi kebijakan tentang berbagai hal krusial yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan.



P R A K A R S A

Welfare Initiative for Better Societies

Jl. Rawa Bambu I Blok A No.8-E
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Indonesia 12520

Phone +6221 781 1798
perkumpulan@theprakarsa.org

The PRAKARSA adalah institusi independent yang bergerak dalam bidang riset dan produksi pengetahuan, pengembangan kapasitas dan advokasi kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan

Pembaca dipersilakan mengutip atau mereproduksi **PRAKARSA Policy Brief** dengan menyebut sumber aslinya asalkan tidak untuk kepentingan komersial. Pandangan tulisan merupakan cerminan pemikiran dari penulis.

www.theprakarsa.org

Beberapa kebijakan di atas nyatanya masih belum bisa menurunkan tingginya jumlah penduduk miskin yang tinggal di rumah tidak layak huni (86,4% atau 33,7 juta penduduk) (PRAKARSA, 2023). Realisasi anggaran subsidi pemerintah untuk perumahan sudah meningkat 7 kali lipat sejak 10 tahun terakhir (Kementerian PUPR, 2023). Akan tetapi, standarisasi rumah layak yang disubsidi pembangunannya oleh pemerintah masih belum menggunakan standar budaya local sehingga deprivasi pada indikator rumah layak dalam pengukuran kemiskinan multidimensi masih tinggi.

Merujuk pada PUPR (2023) disebutkan bahwa kriteria kelayakan skema subsidi masih mengutamakan rumah tapak dibandingkan dengan tipologi lain. Biaya ekonomi subsidi per unit pada nilai saat ini/ *present value* untuk rumah tapak adalah sekitar Rp 60 juta, hanya setengah dari subsidi yang dibutuhkan untuk hunian bertingkat (dengan nilai properti yang lebih tinggi). Rancangan subsidi ini membatasi kemampuan Pemerintah untuk mendukung perumahan di pusat kota yang biayanya jauh lebih tinggi.

Indikator air minum layak, di tahun 2021 sejumlah 57% atau 22,2 juta penduduk miskin tinggal dalam rumah tangga yang tidak punya sumber air minum layak. Permasalahan penyediaan air minum layak bagi rumah tangga miskin berkaitan erat dengan kesenjangan pembiayaan infrastruktur penyediaan air minum layak di Indonesia Berdasarkan data pada laman PUPR (2021) sebanyak 47% dari PDAM di seluruh Indonesia masuk kategori tidak sehat dan sakit. Kategori ini diukur dari indikator kinerja keuangan, pelayanan, operasional, dan SDM. Sejak 24 tahun yang lalu, pemerintah Indonesia sudah menggunakan beberapa skema untuk memperluas akses masyarakat terhadap air minum layak dan capaiannya saat ini sudah mencakup 27.000 desa di 33 provinsi. Namun, pemerintah perlu membuat inovasi skema pembiayaan penyediaan akses air

minum layak karena APBN hanya mampu memenuhi 17% dan APBD hanya 13% dari kebutuhan anggaran sebesar 123,4 triliun (Saptowalyono, 2023).

Kesimpulan dan Rekomendasi

Terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan sebagai berikut:

- BAPPENAS menggunakan hasil pengukuran kemiskinan multidimensi untuk menentukan prioritas pembangunan dalam penyusunan RPJMN 2024-2029 mulai dari kebijakan/program, penganggaran, bahkan penanganan kemiskinan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar lebih tepat sasaran.
- Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota perlu terus menerus menjalankan program sosial-ekonomi yang dipadukan dengan pembangunan infrastruktur dasar (perumahan, air bersih, kesehatan dasar) yang merata di seluruh wilayah.
- Kementerian PUPR perlu meningkatkan subsidi rumah atau unit bagi masyarakat kurang mampu perkotaan dan penyediaan subsidi untuk pembelian material rumah layak/tahan gempa/iklim bagi masyarakat di perdesaan. Selain itu pemerintah perlu melakukan inovasi dalam pembiayaan program penyediaan rumah bagi masyarakat miskin.
- Kementerian Kesehatan perlu menambah fasilitas kesehatan rujukan atau rumah sakit dan tenaga SDM kesehatan yang merata bagi penduduk yang tinggal di wilayah dengan morbiditas tinggi berdasarkan penghitungan AKM.
- Penyusunan pengukuran kemiskinan multidimensi perlu melibatkan organisasi masyarakat sipil, lembaga penelitian, akademisi, dan pihak swasta untuk mengakselerasi penanganan kemiskinan di Indonesia.

Referensi

- BPS. 2023. Profil Kemiskinan di Indonesia September 2022. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html>.
- Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI. 2020. Pemerataan Akses Internet Dengan Infrastruktur TIK. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/pemerataan-akses-internet-dengan-infrastruktur-tik>.
- Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI. 2022. Anggaran Kesehatan. <https://data-apbn.kemenkeu.go.id/lang/id/post/11/anggaran-kesehatan>.
- Kementerian Keuangan. 2022. Alokasi Anggaran Pengentasan Kemiskinan. <https://data-apbn.kemenkeu.go.id/lang/id/post/21/alokasi-anggaran-pengentasan-kemiskinan>.
- PRAKARSA. (2023). Satu Dekade Indeks Kemiskinan Multidimensi Indonesia 2012-2021. Jakarta: Perkumpulan PRAKARSA
- Perkumpulan PRAKARSA.PAMSIMAS Kementerian PUPR. 2023. Sumber Pendanaan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat. https://pamsimas.pu.go.id/profil/#.Perkumpulan_PRAKARSA. 2023. Indeks Kemiskinan Multiimensi 2012-2021. Perkumpulan PRAKARSA: Jakarta.
- PUPR. (2023). Penyediaan Rumah yang Aman, Layak & Terjangkau di Indonesia. http://nahp.pu.go.id/assets/files/storage/NAHP_Book_-_versi_Bahasa_Indonesia.pdf
- Saptowalyono. 2023. Wapres: Indonesia Hadapi Kesenjangan Pembiayaan Infrastruktur Air. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/06/06/wapres-amin-indonesia-hadapi-kesenjangan-pembiayaan-infrastruktur-air>.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38778/uu-no-36-tahun-2009>.